



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 27 Januari 2021

Halaman: 1



Analisis KR PTKM dan UMKM

Dr Hempri Suyatna

PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam konteks DIY diimplementasikan dalam Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) sudah diperpanjang. Dengan PTKM, pembatasan jam operasional rumah makan/restoran, tempat wisata dan berbagai fasilitas publik sebagai telah menurunkan omzet para pelaku UMKM baik yang bergerak di bidang perhotelan, wisata, perdagangan. Agar tidak terlalu merugikan UMKM, perlu ada tambahan kebijakan lain dalam perpanjangan ini.

Pemberian insentif, subsidi atau gerakan-gerakan beli produk UMKM di masa penerapan PTKM ini perlu dioptimalkan sehingga dampak negatif PTKM dapat diminimalkan. Selain itu, promosi, subsidi untuk fasilitasi belanja online/e-marketing seharusnya dapat dimaksimalkan.

Pemerintah jangan sampai hanya fokus kepada soal pengetatan aturan akan tetapi dimensi ekonomi justru terabaikan. Dalam jangka panjang, upaya menyinkronkan kepentingan ekonomi dan kesehatan memang menjadi tantangan utama di era pandemi Covid-19 ini. Dua aspek ini seharusnya dapat berjalan beriringan sehingga eksistensi keduanya dapat terjaga dimana di satu sisi korban Covid-19 tidak makin bertambah dan disisi lain ekonomi juga tidak lumpuh. Program-program pemulihan ekonomi berbasis

** Bersambung hal 7 kol 1*

**Disperindag
Netral
Biasa
Untuk diketahui**

PTKM

protokol kesehatan ini sebenarnya sudah banyak diwacanakan akan tetapi dalam implementasinya berjalan tidak maksimal.

Sejatinya, berbagai kebijakan pemerintah sudah banyak dilakukan untuk membantu perlindungan UMKM di era pandemi Covid-19. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM, digitalisasi UMKM dan sebagainya. Namun demikian, program-program ini juga belum maksimal. Dalam BLT UMKM, sering masih ditemukan salah sasaran.

Dalam digitalisasi dihambat kapasitas pelaku UMKM yang kurang melek digital dan sarana prasarana/infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata. Maka, perlu ada inovasi-inovasi baru baik dari sisi pelaku UMKM maupun pemerintah di dalam proses penanganan dampak pandemi. Dari sisi pelaku, daya lentur UMKM di dalam menghadapi pandemi ini seharusnya menjadi kekuatan mereka untuk tetap eksis.

Modal sosial seperti jejaring dan kepercayaan di antara pelaku UMKM perlu diperkuat. Selain itu, perlu ada terobosan baru selain melalui pemasaran digital agar produk-produk yang dihasilkan pelaku UMKM dapat diterima pasar. Sedangkan dari aspek pemerintah, perlu ada kebijakan-kebijakan yang tidak sekadar normatif di dalam merespons pandemi.

Perlindungan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sosial maupun mengembangkan strategi pemasaran digital. Proses monitoring dan pendampingan tetap harus dilakukan. Kebijakan-kebijakan yang ada seharusnya memperkuat daya lentur sehingga memudahkan pelaku UMKM melakukan adaptasi di tengah pandemi. Pengembangan dan optimalisasi pasar-pasar UMKM, fasilitasi pelaku UMKM yang alih profesi dan peningkatan resiliensi sektor agro dapat dijadikan solusi mengatasi dampak pandemi ini. Kemudian kebijakan-kebijakan digitalisasi UMKM juga perlu diikuti dengan bantuan promosi

platform-platform digital yang dilakukan. Kebijakan UMKM di era pandemi perlu didukung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan ini penting untuk menumbuhkan rasa aman dalam diri masyarakat sehingga muncul kepercayaan membeli produk UMKM. Pelaku-pelaku UMKM seharusnya mendapatkan prioritas untuk vaksinasi setelah tenaga kerja kesehatan karena tingkat interaksi mereka yang cukup tinggi.

Strategi lain yang dapat dilakukan melakukan sertifikasi dan publikasi untuk pasar-pasar, sentra-sentra UMKM yang aman dari covid. Jika kebijakan ini konsisten dilakukan, maka kebijakan PTKM tidak akan menjadi persoalan bagi pelaku UMKM. Mengingat pandemi Covid-19 ini belum jelas kapan berakhir, maka kreativitas dan inovasi dari birokrasi pemerintah dan pelaku UMKM menjadi kata kunci.

(Penulis adalah Kepala Sodec Departemen PSdK Fisipol UGM)-f

By Trihastono S.Sos MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005